

Kolaborasi & Resistensi Identitas Kultural dalam Ekowisata Kayo Pulau di Kampung Tahima Soroma

Tommy O. Sibi¹, Simon Abdi K Frank², J. R. Mansoben³

^{1,2,3}Magister Antropologi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Cenderawasih

Corresponding Author: Tommy O. Sibi, Simon, e-mail: simmon_frank@yahoo.co.id

Published: July, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sosial budaya yang dialami masyarakat Kayo Pulau sebagai respons terhadap pengembangan ekowisata yang digalakkan Pemerintah Kota Jayapura. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi strategi kolaborasi dan resistensi masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya mereka di tengah modernisasi yang didorong oleh pariwisata. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan tinjauan pustaka yang melibatkan 20 informan terpilih dari berbagai latar belakang sosial. Temuan menunjukkan bahwa ekowisata telah merevitalisasi ekspresi budaya lokal dan menyediakan peluang ekonomi baru, sekaligus memicu ketegangan, komodifikasi tradisi, dan pergeseran identitas simbolis. Respons masyarakat bersifat ambivalen: sementara beberapa kelompok mendukung ekowisata sebagai bentuk afirmasi budaya dan peningkatan ekonomi, yang lain menolaknya secara halus maupun terang-terangan demi melestarikan nilai-nilai leluhur dan otonomi spasial mereka. Penelitian ini menyoroti bahwa identitas bukanlah warisan yang statis, melainkan proses yang dinamis dan dinegosiasikan yang dibentuk oleh relasi kuasa, kebanggaan budaya, tuntutan pasar, dan kesadaran ekologis.

Kata Kunci: Identitas Budaya, Ekowisata, Kolaborasi, Resistensi, Kayo Pulau

ABSTRACT

This study aims to analyze the socio-cultural changes experienced by the Kayo Pulau community in response to ecotourism development promoted by the Jayapura City Government. Using a descriptive qualitative method, the research explores the community's collaboration and resistance strategies in maintaining their cultural identity amidst tourism-driven modernization. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and literature review involving 20 selected informants from various social backgrounds. The findings show that ecotourism has revitalized local cultural expressions and provided new economic opportunities while also triggering tensions, commodification of traditions, and symbolic identity shifts. Community responses are ambivalent: while some groups support ecotourism as a form of cultural affirmation and economic upliftment, others resist it subtly or overtly to preserve their ancestral values and spatial autonomy. This research highlights that identity is not a static heritage but a dynamic and negotiated process shaped by power relations, cultural pride, market demands, and ecological consciousness.

Keywords: Cultural Identity, Ecotourism, Collaboration, Resistance, Kayo Pulau

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Mayoritas kehidupan masyarakat pesisir tidak dapat dilepaskan dari 'laut' sebagai sumber kehidupan mereka (Geertz, 1963; Brookfield, 1993; Nustad, 2011; Satria, 2009). Selama ini Papua pun tidak hanya dikenal dengan identitas kehidupan daratan/kontinental, kehidupan masyarakat pesisir dan pulau juga mewarnai variasi karakteristik penduduk berdasarkan ekologi lingkungan tempat tinggalnya. Hingga

muncul dua identitas dikotomis yang stigmatik mengenai penduduk Papua secara umum, yaitu "*Orang Papua Gunung dan Orang Papua Pantai*".

Bahkan harus diakui bahwa sejarah perkembangan Papua, khususnya Kota Jayapura sebagai jantung utama merupakan sejarah kemaritiman. *Port Numbay* nama yang beberapa kali mengalami perubahan hingga menjadi Jayapura ini menunjukkan identitas bahari/laut yang kuat. Lokasi ini menjadi titik permulaan bersentuhannya orang asli Papua dengan dunia luar atau pendatang sejak abad ke-7 hingga ke-13 (Kadir, dkk, 2020; Poli, dkk, 2018; Singh, 2008).

Port Numbay atau kini Jayapura memiliki sejarah laut yang kaya dan identitas laut yang begitu kuat. Wilayah ini juga telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan maritim, migrasi, dan interaksi budaya selama berabad-abad di kawasan Pasifik dan Asia Tenggara (Brookfield, 1993). Secara adat, wilayah ini masuk dalam wilayah adat Mamta, satu dari tujuh wilayah adat yang ada di Papua (Mansoben, 1995). Masyarakatnya terdiri dari orang Tobati, Enggros, Kayo Pulau, Kayu Batu, hingga Skow di perbatasan Papua Nugini (PNG) (Yuliana, dkk, 2025; Flassy, dkk, 2024; Idris, dkk, 2024; Yuliana dkk., 2023; kadir, 2021).

Satu di antara lima masyarakat penghuni asli Jayapura dengan identitas lautnya adalah masyarakat suku bangsa di Kayo Pulau. Mereka menempati wilayah yang juga dikenal dengan sebutan kampung Kayo Pulau, masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Kampung Tahima Soroma, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Teluk Humbolt di bagian utaranya. Kampung ini dihuni oleh empat klan atau marga yaitu Sibi, Haay, Sorro, dan Youwe. Kampung ini belum dapat diketahui asal muasal terbentuknya (Idris, dkk, 2024; Yuliana dkk., 2023; Djasman & Kristianingsih, 2022:73; Aronggear, dkk, 2020).

Dari beberapa catatan penelitian ini, sejak dahulu identitas kampung Kayo Pulau dikenal sebagai masyarakat bahari atau laut, yang artinya memanfaatkan sumber daya laut dan ekosistem pesisir bagi kehidupannya. Perkampungan ini dibangun memanjang di pesisir di atas permukaan air laut, pemukiman masyarakat Kayo Pulau sangat khas dan unik (Idris, dkk, 2024). Ini merepresentasikan bagaimana masyarakat Kayo Pulau tidak dapat dipisahkan dengan entitas laut. Simbolisasi klan/marga juga lekat dengan laut seperti simbol ikan gurango dan kepiting putih bagi marga Haay atau simbol penyu dan lobster bagi marga Youwe. Identitas ini begitu kuat mengasosiasikan kampung Kayo Pulau sebagai tempat hidup masyarakat yang identik dengan kebudayaan lautnya.

Penelitian ini juga menghimpun sejarah tutur tentang laut Kayo Pulau yang mencerminkan perjalanan panjang interaksi manusia dengan laut yang telah membentuk budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ini. Menurut masyarakat setempat, dari masa ke masa, laut selalu menjadi elemen vital bagi kehidupan masyarakat Kayo Pulau. Mulanya mayoritas penduduk terlibat dalam kegiatan perikanan, baik sebagai nelayan maupun sebagai pengolah hasil laut. Aktivitas penangkapan ikan, pengumpulan kerang, dan penangkapan hewan laut lainnya menjadi bagian penting dari ekonomi lokal. Namun dalam

perkembangannya diversifikasi mata pencaharian non-laut mulai banyak dijalani oleh masyarakat Kayo Pulau.

Bagi masyarakat Kayo Pulau laut juga berperan sebagai penghubung sosial. Aktivitas laut, seperti penangkapan ikan dan perdagangan hasil laut, sering dilakukan secara kolektif yang memperkuat ikatan komunitas. Gotong royong dan kerja sama dalam kegiatan laut menciptakan rasa solidaritas dan kebersamaan yang kuat di antara penduduk. Berbagai upacara yang terkait dengan laut, menjadi ajang untuk berkumpul dan merayakan bersama. Selain itu, mitos dan cerita rakyat yang berkembang di Kayo Pulau banyak berkisah tentang laut. Legenda tentang makhluk laut, asal-usul pulau, dan nenek moyang menjadi bagian dari narasi kolektifitas masyarakat Kayo Pulau yang menjadi pendanda identitas kultural awal mereka.

Identitas kultural atau identitas budaya didefinisikan sebagai rincian karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang diketahui batas-batasnya (*bonded*), tatkala dibandingkan dengan karakteristik atau ciri-ciri kebudayaan lain (Liliweri, 2005: 41-42). Geertz, (1973:89) menjelaskan sesungguhnya kebudayaan selalu memiliki batas-wilayah di mana sekelompok orang mencari makna terhadap simbol-simbol. Simbol dan makna tersebut merupakan kesepakatan bersama dari suatu masyarakat atau suatu komunitas yang kemudian dapat ditandai sebagai suatu identitas budaya. Identitas yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat mempengaruhi persepsi diri setiap anggota dalam masyarakat. Bagaimana mereka memandang diri mereka, bagaimana mereka bersikap dan bertindak laku, sangat dipengaruhi oleh identitas budaya mereka sendiri.

Dalam perkembangannya, modernisasi membawa banyak perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat Kayo Pulau (lihat Appadurai, 1996). Meskipun modernisasi menawarkan banyak manfaat seperti peningkatan infrastruktur, akses ke pendidikan, dan peningkatan ekonomi, hal ini juga membawa tantangan serius terhadap identitas kultural yang telah terbangun selama berabad-abad (Firth, 1946).

Salah satu dampak utama modernisasi adalah perubahan ekonomi dan gaya hidup (Appadurai, 1996). Secara tidak langsung terjadi perubahan identitas yang sebelumnya sebagai masyarakat pemanfaat sumberdaya laut dan pesisir ke identitas terkini yaitu “penyedia ekowisata”. Dalam beberapa penuturan informan mereka menyebut “*dari kampung nelayan ke kampung wisata*”.

Perubahan ini dilatari oleh kebijakan pemerintah Kota Jayapura dengan menjadikan Kayo Pulau menjadi pengembangan destinasi wisata unggulan melalui skema ekowisata atau *ecotourism* sejak tahun 2013. Hal ini tertuang dalam dokumen rencana pola ruang Kota Jayapura, sebagai salah satu pengembangan pariwisata budaya (RTRW Kota Jayapura 2013-2033).

Ekowisata adalah bentuk pariwisata yang berfokus pada konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal, bertujuan mengurangi dampak negatif terhadap alam sambil meningkatkan kesadaran lingkungan. Selain itu, ekowisata juga berupaya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Namun, penting agar ekowisata dikelola secara berkelanjutan untuk mencegah kerusakan ekosistem akibat overkapasitas atau pembangunan yang tidak sesuai dengan lingkungan sekitar (Honey, 2008; Wearing & Neil, 2009).

Selama satu dekade ini, pengembangan destinasi wisata Kayo Pulau melalui program ekowisata oleh pemerintah Kota Jayapura membawa dampak yang signifikan pada identitas kultural masyarakat (lihat Goeldner dan Ritchie, 2012). Termasuk proses konstruksi hingga reproduksi identitas baru yang berjalan (Abdullah, 2010). Ekowisata memang digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan budaya dan tradisi lokal. Namun, proses satu dekade ini nyatanya tidak berjalan ideal, proses yang dikatakan Irwan Abdullah (2010) sebagai kontruksi dan reporduksi identitas ini berjalan dalam dua poros yaitu kolaborasi dan resistensi (Scott, 1985; 1990).

Proses kolaborasi dan resistensi terhadap identitas kultural di Kayo Pulau adalah proses yang kompleks dan dinamis, di mana tradisi lama bertemu dengan pengaruh-pengaruh baru yang masuk. Citra Kayo Pulau yang semula dikenal sebagai kampung nelayan, kini mengemuka menjadi kampung wisata yang terus memperoleh dukungan, bahkan dari pemerintah pusat. Pada Juli 2023, masa itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, juga melakukan kunjungan khusus sekaligus mempromosikan Kayo Pulau sebagai destinasi wisata.

Dilematika antara menerima kebijakan pemerintah dan menjadi kolaborator atau menolak dan resisten terhadap identitas baru kepariwisataan terus berkejolak di masyarakat. Meminjam pendekatan James C. Scott (1985; 1990) maka terdapat dua bentuk respon yang muncul yaitu *public transcript* dan *hidden transcript*. Konsep Infrapolitics milik Scott juga mencerahkan bahwa politik perlawanan tidak selalu tampak dalam aksi-aksi besar seperti demonstrasi atau revolusi, tetapi sering muncul dalam bentuk tindakan kecil dan sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat Kayo Pulau tidak menolak ekowisata secara langsung, tetapi mengatur ulang aturan atau praktik budaya mereka untuk mempertahankan kontrol atas sumber daya mereka, termasuk identitas kultural atau budaya mereka

Penelitian ini secara khusus mencoba menganalisis sejauh mana kebijakan ekowisata memengaruhi perubahan sosial masyarakat Kayo Pulau. Pada bagian keduanya fokus pada bentuk-bentuk kolaborasi dan resistensi yang terjadi di Kayo Pulau. Terakhir adalah peran ekowisata dalam membentuk persepsi masyarakat Kayo Pulau. Kampung Kayo Pulau, seperti banyak komunitas lainnya, mengalami perubahan seiring waktu akibat berbagai faktor seperti teknologi dan interaksi dengan budaya luar. Proses dialektika ini seringkali mencerminkan dinamika yang luas, di mana identitas kultural terus berkembang dan masyarakat menyesuaikan diri (baca: kolaborasi) dengan perubahan zaman sambil tetap mempertahankan akar dan esensi tradisionalnya (baca: resistensi). Proses kolaborasi dan resistensi terhadap identitas ini menjadi narasi antropologis yang menarik melalui kajian penelitian ini.

Lebih jauh lagi, pesatnya teknologi (khusus: media sosial) menjadikan identitas kultural Kayo Pulau kini divisualisasikan dan direpresentasikan diberbagai beranda. Melalui platform seperti Instagram,

Facebook, hingga TikTok, penduduk dan pendatang (wisatawan) berbagi cerita, pengalaman, dan pandangan mereka secara tidak langsung tentang perubahan yang terjadi di Kayo Pulau. Realitas tentang identitas baru Kayo Pulau ini bukan sekedar wacana. Dalam dekade terakhir, pulau nelayan ini nyatanya telah disulap menjadi pulau wisata unggulan.

Ekowisata di Kayo Pulau bukan sekedar fenomena ekonomi dan lingkungan, tetapi juga arena negosiasi antara kepentingan pembangunan dan pelestarian identitas kultural masyarakat lokal. Dalam dinamika ini, kolaborasi dan resistensi menjadi strategi yang saling berkelindan, di mana masyarakat tidak hanya beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh ekowisata, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai budaya mereka melalui berbagai bentuk perlawanan, baik yang terbuka maupun terselubung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana masyarakat Kayo Pulau atau Kampung Tahima Soroma menavigasi hubungan mereka dengan pihak eksternal dalam konteks ekowisata, serta bagaimana strategi kolaborasi dan resistensi mereka membentuk identitas kultural di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode deskriptif kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena sesuai dengan panduan yang diungkapkan oleh Creswell (2014), yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial melalui perspektif individu yang terlibat, serta untuk menggali pengalaman, sikap, dan pandangan mereka dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, hal ini sangat penting karena kolaborasi dan resistensi tidak hanya berupa tindakan yang bisa diukur secara kuantitatif, tetapi lebih terkait dengan pemahaman yang mendalam mengenai makna yang diberikan masyarakat Kayo Pulau terhadap pariwisata dan identitas budaya mereka. Creswell menekankan pentingnya fleksibilitas dan keterbukaan dalam pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan diri dengan dinamika lapangan yang terus berkembang. Dengan demikian, metode kualitatif memberi ruang bagi peneliti untuk mendalami persepsi masyarakat Kayo Pulau yang mungkin tidak dapat dipahami melalui teknik penelitian lainnya.

Selain itu, Moleong (2014) juga menekankan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali dan memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, dengan mendalam menggali konteks dan makna yang terkandung dalam interaksi sosial tersebut. Moleong menggarisbawahi bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman proses dan bukan hanya hasil akhir, serta menekankan pentingnya teknik pengumpulan data yang berorientasi pada subjek yang diteliti, seperti wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hal ini relevan dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk lebih memahami bagaimana masyarakat Kayo Pulau mengintegrasikan kolaborasi dan resistensi dalam kehidupan mereka sehari-hari seiring dengan adanya pariwisata, serta bagaimana mereka menanggapi

perubahan yang terjadi pada tingkat sosial, budaya, dan ekonomi. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa-nuansa yang lebih halus dan kompleks dalam hubungan masyarakat dengan pariwisata, yang tidak dapat dijelaskan secara sederhana menggunakan pendekatan kuantitatif.

Lokasi Penelitian

Secara spesifik lokasi penelitian ini bertempat di Kayo Pulau. Kampung ini secara administratif berada di Kampung Tahima Soroma, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Lokasi ini dipilih karena adanya refleksi pengalaman pribadi dimana terjadi perubahan identitas pada masyarakat kampung yang semula sebagai pengumpul sumberdaya laut seperti ikan dan kerang-kerang, menjadi masyarakat penyelenggara wisata, khususnya ekowisata. Kampung Kayo Pulau memang tidak dapat dipisahkan baik secara historis maupun secara geografis dengan Kota Jayapura. Kampung ini menjadi “pintu gerbang penyambut akses masuk Kota Jayapura melalui jalur laut”. Dinamika dan perkembangan baru yang kompleks panca ditetapkan sebagai salah satu destinasi unggulan pengembangan pariwisata Kota Jayapura, sehingga menarik untuk melihat proses kolaborasi dan resistensi terhadap identitas kultural Kayo Pulau pasca menjadi destinasi ekowisata.

Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi pustaka, yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika sosial masyarakat Kayo Pulau dalam konteks ekowisata.

Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan menggali pandangan, pengalaman, dan perspektif masyarakat setempat, tokoh adat, pelaku usaha pariwisata, serta pihak terkait lainnya. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel untuk mengeksplorasi topik-topik terkait kolaborasi, resistensi, dan pelestarian identitas budaya. Peneliti berusaha menciptakan hubungan yang terbuka dan saling percaya dengan informan, sehingga informan dapat berbicara secara bebas tentang perasaan dan pengalaman mereka dalam menghadapi perubahan akibat pariwisata. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam ini memberikan informasi kualitatif yang kaya, yang mencerminkan perspektif dan pemahaman langsung dari mereka yang terlibat.

Kedua, observasi partisipatif dilakukan untuk memungkinkan peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kayo Pulau, guna mengamati bagaimana kolaborasi dan resistensi terjadi dalam interaksi sosial yang tidak selalu dapat diungkapkan melalui wawancara. Peneliti berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, seperti pertemuan desa, acara budaya, atau aktivitas terkait ekowisata, untuk memahami dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Melalui observasi partisipatif,

peneliti dapat menangkap perilaku dan interaksi yang menunjukkan bentuk resistensi yang lebih halus atau kolaborasi yang tidak secara eksplisit dibicarakan oleh informan.

Terakhir, studi pustaka dilakukan untuk melengkapi dan mendukung temuan lapangan dengan teori dan literatur yang relevan. Peneliti mengumpulkan informasi dari buku, artikel, laporan, dan jurnal yang membahas topik-topik terkait seperti ekowisata, identitas budaya, kolaborasi dan resistensi dalam konteks sosial, serta kebijakan pariwisata yang berkelanjutan. Studi pustaka ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar teoritis untuk memahami temuan, tetapi juga memberikan perspektif yang lebih luas mengenai konsep-konsep yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan demikian, kombinasi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya, mendalam, dan kontekstual, yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana masyarakat Kayo Pulau merespons perubahan sosial dan budaya yang dibawa oleh pariwisata.

Informan Penelitian

Teknik penentuan informan penelitian dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data (informan) dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, yang pertimbangannya adalah: warga masyarakat kampung Kayo Pulau (dari semua marga), stakeholder yang terlibat dalam pengembangan wisata kampung Kayo Pulau, baik dari pemerintahan maupun swasta. Informan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 20 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan, dengan rentan usia 23 tahun sampai 72 tahun, terdiri dari berbagai diversifikasi pekerjaan. Mereka inilah yang mampu memberikan informasi yang akurat yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tabel Informan Penelitian

Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan/Status Sosial
Saul Sibi	72	L	Tua Adat
Theresia Haay	70	P	Tokoh Perempuan
Oktovina Sibi	70	P	Tokoh Perempuan
Hagar Sibi	59	P	Tokoh Perempuan
Ferdinand Haay	35	L	PNS
Hengkys Soro	52	L	Kepala Suku
Berthus Youwe	64	L	Nelayan
Paula Youwe	60	P	IRT
Susana Sibi	51	P	Pedagang
Devatha Youwe	55	P	Pedagang
Luther Haay	39	L	Ojek Laut
Stevanus Sibi	23	L	Ojek Laut
Nicolaas Youwe	54	L	Ondoafi
Anggrainida	48	P	Dinas Pariwisata
Gabby	53	P	Dinas Pariwisata
Santos	31	L	Wisatawan
Irianti	32	P	Wisatawan
Zandra	43	P	Wisatawan
Aldo Youwe	33	L	Aparat Kampung

Analisis Data

Analisis data penelitian menggunakan analisis interpretatif kualitatif (Creswell, 2014: 274-284), melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) Mempersiapkan data dari data primer dan data-data sekunder; (2) Membaca keseluruhan data secara berulang-ulang; (3) Meng-*coding* data, yaitu memberi kode-kode pada data; (4) Menganalisa semua yang muncul dan topik-topik yang telah dikelompokkan kemudian dibuat tema-tema. (5) Pendekatan deskriptif, yaitu keseluruhan data diinterpretasi kemudian mendeskripsikan secara sistematis kembali data, temuan, bersama analisisnya. Dilengkapi dengan referensi kutipan dan konsep atau teori terkait dengan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Dampak Ekowisata terhadap Identitas Kultural Masyarakat Kayo Pulau*****Dampak Positif***

Ekowisata di Kayo Pulau telah menciptakan ruang baru bagi revitalisasi budaya lokal yang sebelumnya mengalami penurunan akibat tekanan modernisasi dan urbanisasi. Melalui berbagai atraksi wisata berbasis budaya seperti tarian adat, pameran kerajinan tangan, dan upacara tradisional, masyarakat lokal kembali menghidupkan tradisi yang mulai dilupakan. Aktivitas ini mendorong generasi muda untuk mempelajari dan memahami warisan budaya mereka, memperkuat ikatan antar generasi dan menumbuhkan rasa bangga terhadap jati diri lokal. Kehadiran wisatawan yang mengapresiasi budaya mereka turut menegaskan pentingnya pelestarian tersebut di mata komunitas lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Zeppel dan Hall (1991) bahwa pariwisata budaya dapat menjadi pemicu kebangkitan identitas tradisional di tengah gempuran modernitas.

Pengembangan ekowisata di Kayo Pulau juga berdampak pada meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat akan nilai ekonomi dan sosial dari budaya lokal yang mereka miliki. Praktik budaya seperti pembuatan sagu, cerita rakyat, dan teknik kerajinan laut yang sebelumnya dianggap biasa kini menjadi aset yang dihargai secara ekonomi. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk menggali kembali warisan budaya yang sempat ditinggalkan dan mengemasnya dalam format yang dapat diterima oleh pasar wisata. Proses ini tidak hanya memperkuat identitas budaya tetapi juga menjadi bentuk ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal. Seperti ditegaskan oleh Smith (2009), revalorisasi budaya lokal dalam pariwisata dapat membangkitkan kesadaran baru terhadap pentingnya identitas kultural.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan ekowisata juga memperkuat solidaritas sosial dan identitas kolektif. Kegiatan seperti pembangunan fasilitas wisata, pengorganisasian pertunjukan budaya, serta pelatihan pemandu wisata mendorong kerja sama antarwarga. Kolaborasi ini menghasilkan kohesi sosial yang sebelumnya melemah akibat individualisasi ekonomi modern. Keterlibatan kolektif tersebut menciptakan rasa memiliki terhadap ekowisata sebagai bagian dari representasi budaya mereka sendiri.

Cohen (1988) menyatakan bahwa kolaborasi dalam pariwisata dapat memperkuat identitas komunal dan mempererat jaringan sosial lokal.

Peran generasi muda dalam ekowisata membawa dampak signifikan terhadap pelestarian dan pembaruan identitas budaya. Melalui pelatihan dan pelibatan dalam kegiatan wisata, pemuda menjadi agen perubahan yang menggabungkan pemahaman tradisi dengan inovasi digital, seperti mendokumentasikan cerita rakyat lewat media sosial. Pemuda tidak hanya menjadi pelanjut tradisi, tetapi juga aktor penting dalam menjembatani identitas lama dengan narasi baru yang relevan di era modern. Hal ini memperlihatkan bahwa identitas kultural tidak bersifat statis, melainkan senantiasa dinegosiasikan dalam ruang sosial. Pendekatan ini sesuai dengan pendapat Wearing dan Neil (2009) mengenai ekowisata sebagai medium pendidikan kultural antar generasi.

Citra Kayo Pulau sebagai destinasi ekowisata turut memperkuat eksistensi identitas lokal di mata dunia luar. Branding budaya lokal sebagai daya tarik wisata bukan hanya memperkenalkan masyarakat Kayo Pulau secara lebih luas, tetapi juga mengangkat nilai-nilai budaya mereka ke dalam arus utama pariwisata. Narasi positif ini membentuk kepercayaan diri kolektif bahwa budaya mereka layak dihargai dan dibanggakan. Proses ini mempertegas bahwa identitas budaya dapat dikukuhkan secara internal maupun eksternal melalui praktik representasi yang terkelola. MacCannell (1976) mengungkapkan bahwa representasi budaya dalam pariwisata memberi kontribusi terhadap penguatan identitas melalui pengakuan sosial.

Penggunaan kearifan lokal dalam aktivitas ekowisata menunjukkan integrasi nilai budaya ke dalam praktik ekonomi berkelanjutan. Contohnya adalah penggunaan bahan alami lokal dalam membangun homestay atau memproduksi souvenir tradisional yang mencerminkan identitas budaya laut. Strategi ini tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga menjaga agar budaya lokal tetap hidup dan kontekstual dalam dinamika ekonomi baru. Dengan demikian, identitas budaya tidak sekadar simbolis tetapi memiliki fungsi konkret dalam sistem ekonomi komunitas. Pandangan ini sejalan dengan prinsip pengembangan berkelanjutan menurut UNEP dan WTO (2005) dalam pariwisata berbasis komunitas.

Interaksi lintas budaya yang terjadi dalam ekowisata juga memperluas wawasan masyarakat terhadap pentingnya pluralitas, refleksi diri, dan artikulasi identitas. Dalam dialog yang terbangun dengan wisatawan, masyarakat mulai memaknai kembali siapa mereka dan bagaimana menjelaskan budaya mereka kepada orang luar. Kemampuan untuk mendefinisikan ulang diri secara selektif ini memperlihatkan adanya kesadaran kritis terhadap identitas yang sebelumnya taken for granted. Proses ini menghasilkan bentuk identitas baru yang adaptif namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal. Urry (2002) menyebutnya sebagai “*mutual gaze*”, yaitu pertukaran pandangan antara masyarakat lokal dan wisatawan dalam membentuk persepsi budaya.

Ekowisata juga membuka ruang bagi perempuan untuk mengambil peran penting dalam reproduksi budaya lokal. Dalam berbagai kegiatan, perempuan tampil sebagai pengrajin, narator tradisi, dan pengelola

layanan wisata yang berkaitan dengan budaya. Keikutsertaan aktif perempuan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga memperkaya proses pewarisan budaya melalui perspektif gender. Identitas kultural pun direproduksi tidak secara pasif, tetapi melalui artikulasi peran yang setara dan aktif dari perempuan lokal. Pendekatan ini dikuatkan oleh Wearing dan Wearing (2001), yang menekankan pentingnya peran perempuan dalam transformasi sosial melalui pariwisata berkelanjutan.

Dampak Negatif

Komodifikasi budaya merupakan salah satu dampak negatif utama dari pengembangan ekowisata di Kayo Pulau. Praktik budaya seperti tarian adat atau upacara tradisional dipentaskan secara berulang demi menyenangkan wisatawan, mengorbankan makna sakral atau spiritualnya. Budaya yang semestinya dijalani dengan kesungguhan menjadi alat pertunjukan tanpa konteks yang memadai. Proses ini tidak hanya mengurangi kedalaman budaya, tetapi juga berisiko mengaburkan makna asli yang seharusnya diwariskan secara sakral. Greenwood (1989) menyebut fenomena ini sebagai “*touristic fallacy*,” yaitu reduksi budaya menjadi sekadar konsumsi wisata.

Interaksi yang intensif dengan wisatawan luar turut mendorong adopsi nilai-nilai yang tidak selalu sejalan dengan budaya lokal. Generasi muda cenderung meniru gaya hidup dan pemikiran luar yang diperkenalkan wisatawan, sehingga minat terhadap budaya lokal mulai menurun. Ketertarikan terhadap praktik tradisional dianggap kuno dan tidak menarik dibandingkan dengan budaya pop global. Hal ini menyebabkan erosi identitas yang bersifat laten namun terus berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Picard (1996) menunjukkan bahwa pariwisata dapat menimbulkan tekanan asimilatif yang melemahkan identitas asli komunitas.

Ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi dari ekowisata juga memunculkan konflik internal yang berdampak pada identitas sosial. Ketika hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat langsung dan memperoleh keuntungan, muncul rasa iri dan marginalisasi dari kelompok lain. Identitas budaya yang seharusnya menjadi sumber persatuan justru berubah menjadi arena perebutan dan eksklusivitas sosial. Kondisi ini menimbulkan fragmentasi dalam komunitas dan melemahkan kohesi kultural yang telah terbangun. Cole (2007) menjelaskan bahwa ketimpangan dalam pariwisata budaya dapat menciptakan hierarki baru yang tidak sehat dalam masyarakat.

Dorongan untuk menyederhanakan budaya agar mudah dipahami wisatawan turut menyebabkan homogenisasi ekspresi budaya. Praktik budaya yang kaya dan kompleks sering dikompresi menjadi satu paket atraksi yang mudah dijual, namun kehilangan makna dalam prosesnya. Akibatnya, identitas budaya yang dulunya variatif dan dinamis menjadi monolitik dan kaku sesuai selera pasar. Ini mengarah pada representasi yang tidak akurat dan cenderung stereotipikal terhadap budaya lokal. Konsep “*staged authenticity*” oleh MacCannell (1976) menjelaskan bagaimana budaya yang disajikan kepada wisatawan seringkali merupakan versi buatan atau konstruksi yang tidak merepresentasikan realitas.

Tekanan pasar dalam dunia pariwisata menyebabkan masyarakat merasa perlu untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi wisatawan, bahkan jika itu berarti mengorbankan nilai-nilai tradisional. Upacara adat atau praktik budaya sering dimodifikasi agar lebih atraktif dan sesuai dengan selera pengunjung. Hal ini menimbulkan transformasi identitas yang tidak organik, di mana orientasi budaya bergeser dari spiritualitas ke komersialitas. Proses ini mengarah pada distorsi nilai-nilai budaya yang sebelumnya sangat dihormati. Chambers (2000) menyebut fenomena ini sebagai *cultural distortion* dalam industri pariwisata.

Transformasi ruang publik menjadi ruang ekonomi wisata menyebabkan tergesernya ruang-ruang budaya masyarakat. Tempat-tempat yang dulunya digunakan untuk aktivitas adat kini berubah fungsi menjadi area komersial seperti spot foto atau warung wisata. Hal ini menimbulkan konflik antara fungsi sakral dan fungsi ekonomi dari suatu lokasi. Jika tidak diatur, masyarakat akan kehilangan ruang untuk mengekspresikan dan melestarikan identitas kulturalnya. Salazar (2012) menekankan bahwa dalam konteks pariwisata, ruang budaya seringkali terpinggirkan demi estetika dan kenyamanan turistik.

Keterlibatan aktor luar seperti investor dan LSM dalam pengelolaan ekowisata kadang menciptakan relasi dominasi yang meminggirkan peran otentik masyarakat lokal. Masyarakat hanya dilibatkan sebagai pelaksana teknis, sementara pengambilan keputusan berada di luar kontrol mereka. Situasi ini menyebabkan alienasi budaya di mana masyarakat kehilangan otonomi atas representasi budaya mereka sendiri. Identitas budaya pun direproduksi oleh pihak luar yang tidak memiliki kedekatan emosional atau kultural dengan budaya tersebut. Scheyvens (1999) menyebut kondisi ini sebagai marginalisasi terselubung dalam pengembangan pariwisata.

Kurangnya edukasi budaya dalam paket ekowisata menyebabkan wisatawan membentuk persepsi yang dangkal terhadap budaya lokal. Mereka menilai budaya lokal dari permukaan, seperti pakaian adat atau musik tradisional, tanpa memahami makna historis dan sosial di baliknya. Hal ini dapat menciptakan eksotisme atau romantisasi yang berlebihan terhadap budaya lokal. Masyarakat kemudian dihadapkan pada dilema: antara mempertahankan makna atau menyesuaikan diri demi menarik perhatian pasar. Silver (1993) menunjukkan bahwa representasi budaya dalam pariwisata sering kali tidak netral dan sarat bias persepsi luar.

Kolaborasi dan Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Perkembangan Ekowisata di Kayo Pulau ***Kolaborasi***

Kolaborasi antara masyarakat lokal Kayo Pulau dan pihak luar seperti LSM, pemerintah daerah, dan pelaku pariwisata menunjukkan dinamika positif dalam pengembangan ekowisata. Kolaborasi ini ditunjukkan melalui kesepakatan bersama dalam memanfaatkan potensi alam tanpa merusak lingkungan, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam kegiatan wisata bahari. Masyarakat Kayo Pulau, terutama tokoh adat dan nelayan, mulai dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan konservasi terumbu karang dan pengelolaan wisata berbasis komunitas. Pelibatan ini memberikan rasa memiliki terhadap program ekowisata dan memperkuat legitimasi sosial atas keberadaan aktivitas pariwisata. Kolaborasi ini juga

memicu kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir sebagai sumber penghidupan jangka panjang.

Upaya kolaboratif terlihat dalam pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan mitra pembangunan lainnya. Pokdarwis menjadi wadah partisipasi masyarakat untuk menyuarakan ide, serta sebagai pelaksana utama kegiatan seperti wisata mangrove, snorkeling, dan budaya kuliner lokal. Masyarakat dilatih menjadi pemandu wisata, pengelola homestay, hingga penyedia jasa perahu tradisional. Dengan peran ini, kolaborasi menjadi sarana pemberdayaan ekonomi lokal yang menekan ketergantungan terhadap eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Bentuk-bentuk kemitraan ini mencerminkan pendekatan partisipatif dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Kolaborasi juga terjadi dalam bentuk penyusunan regulasi lokal yang mengatur zonasi wilayah konservasi, tempat penangkapan ikan tradisional, dan jalur wisata. Proses ini dilakukan secara deliberatif melalui musyawarah kampung yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perempuan dan pemuda. Hasilnya adalah peraturan kampung yang memberikan perlindungan terhadap wilayah adat sekaligus membuka ruang pemanfaatan ekonomis yang tetap berbasis ekologi. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya berorientasi pada output ekonomi, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai sosial dan kultural masyarakat. Regulasi yang disepakati bersama ini memperkuat posisi tawar masyarakat dalam menghadapi potensi eksploitasi dari luar.

Dalam konteks pendidikan dan penguatan kapasitas, kolaborasi juga terwujud melalui program pelatihan yang melibatkan institusi akademik dan organisasi lingkungan. Pelatihan ini tidak hanya fokus pada keterampilan teknis pariwisata, tetapi juga menyentuh aspek pengetahuan ekologi lokal dan manajemen konflik. Transfer pengetahuan ini memperluas pemahaman masyarakat tentang ekowisata sebagai sistem yang kompleks dan saling terhubung. Pendidikan lingkungan berbasis lokal juga mulai diperkenalkan di sekolah-sekolah kampung sebagai bentuk investasi jangka panjang. Kolaborasi ini memperkuat modal sosial dan intelektual masyarakat untuk mendukung keberlanjutan ekowisata.

Kolaborasi dalam ekowisata juga memperlihatkan sinergi antara nilai adat dan logika pasar. Masyarakat adat yang memiliki kearifan dalam pengelolaan laut dan daratan mendapati bahwa nilai-nilai mereka dapat bersanding dengan prinsip-prinsip ekowisata modern. Dalam hal ini, kolaborasi menjadi ruang negosiasi antara tradisi dan inovasi, antara identitas kultural dan kebutuhan ekonomi. Hal ini menciptakan bentuk hibriditas sosial yang memperkaya narasi ekowisata di Kayo Pulau. Kolaborasi semacam ini membuka peluang bagi bentuk pariwisata yang lebih inklusif dan berbasis hak-hak masyarakat adat.

Terdapat pula dukungan dari pemerintah daerah yang menyediakan insentif, regulasi, dan promosi pariwisata yang mengangkat narasi lokal. Pemerintah daerah membantu dalam memperkuat legalitas kelompok masyarakat dalam pengelolaan ekowisata dan memberikan ruang promosi melalui festival dan agenda wisata kota. Kolaborasi vertikal ini menempatkan masyarakat bukan sekadar objek pembangunan,

tetapi sebagai aktor utama yang memiliki kontrol terhadap ruang hidupnya. Relasi yang terbangun ini penting dalam membangun tata kelola kolaboratif yang adil. Peran negara dalam kolaborasi ini menjadi fasilitator, bukan dominator.

Kerja sama juga terlihat dalam pengembangan paket wisata berbasis narasi lokal, seperti sejarah, mitos, dan praktik keseharian masyarakat Kayo Pulau. Kolaborasi dengan akademisi dan antropolog turut membantu dalam merangkai narasi otentik yang tidak hanya menjual eksotisme, tetapi juga mendidik wisatawan. Dengan begitu, wisata tidak menjadi bentuk kolonialisasi budaya, melainkan sebagai media edukasi antar budaya. Masyarakat menjadi juru cerita atas pengalaman mereka sendiri, bukan sekadar pelayan wisata. Ini menunjukkan dimensi kolaboratif yang memperkuat posisi simbolik masyarakat lokal.

Kolaborasi di Kayo Pulau, dengan demikian, adalah proses yang berjalan dinamis dan kontekstual. Ia bukan semata hubungan teknokratis, tetapi hubungan sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan, pengakuan, dan saling menghormati. Melalui kolaborasi, ekowisata menjadi medium untuk mengartikulasikan kedaulatan atas ruang hidup dan membangun solidaritas lintas aktor. Kolaborasi ini tidak bebas dari tantangan, tetapi menjadi titik masuk bagi transformasi sosial yang lebih inklusif. Ini menegaskan pentingnya pembangunan berbasis komunitas dalam konteks ekowisata di wilayah pesisir seperti Kayo Pulau.

Resistensi

Di balik wajah kolaboratif ekowisata di Kayo Pulau, terdapat pula resistensi yang muncul dari sebagian kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan atau kehilangan kontrol atas ruang hidupnya. Resistensi ini muncul karena kekhawatiran terhadap komodifikasi budaya dan marginalisasi nilai-nilai adat dalam pengelolaan wisata. Beberapa warga menolak proyek pembangunan fasilitas wisata yang dianggap merusak situs keramat atau mengubah pola penggunaan lahan. Ketakutan akan kehilangan akses terhadap sumber daya alam tradisional seperti lokasi menangkap ikan dan memanen sagu juga menjadi sumber ketegangan. Ini menunjukkan bahwa resistensi adalah bentuk perjuangan atas hak dan identitas komunitas lokal.

Sebagian masyarakat memandang bahwa ekowisata lebih menguntungkan pihak luar, terutama investor dan operator wisata dari kota, ketimbang masyarakat kampung itu sendiri. Kesenjangan distribusi manfaat menjadi pemicu ketidakpuasan yang memunculkan praktik sabotase atau penolakan halus terhadap kegiatan wisata tertentu. Dalam beberapa kasus, warga menolak menjual tanah atau menolak keterlibatan dalam program pelatihan karena merasa tidak dilibatkan sejak awal dalam perencanaan. Resistensi ini bukan bentuk anarkisme, tetapi ekspresi politik lokal atas ketimpangan struktur kekuasaan dalam ekowisata. Dengan kata lain, resistensi adalah bahasa yang digunakan komunitas untuk menegosiasikan ulang relasi mereka dengan negara dan pasar.

Praktik resistensi juga tampak dalam bentuk upaya mempertahankan praktik-praktik adat yang tidak selalu sesuai dengan logika komersial pariwisata. Misalnya, tradisi tutup kampung atau larangan melaut

pada waktu-waktu tertentu seringkali bertentangan dengan jadwal wisatawan. Namun masyarakat tetap mempertahankan aturan ini sebagai bagian dari sistem sosial-ekologis mereka. Penolakan terhadap intervensi yang melanggar batas-batas sakral menunjukkan bahwa resistensi dapat berfungsi sebagai mekanisme proteksi terhadap nilai budaya. Dalam hal ini, resistensi menjadi sarana untuk menjaga otonomi budaya di tengah tekanan pasar wisata.

Resistensi tidak selalu bersifat terbuka atau frontal, tetapi sering kali muncul dalam bentuk diam, menghindar, atau menunda kerja sama. Taktik-taktik ini merupakan bentuk resistensi sehari-hari sebagaimana dijelaskan oleh James C. Scott (1985) sebagai “weapons of the weak.” Masyarakat mungkin bersikap sopan di depan pihak luar, tetapi di baliknya mereka melakukan penundaan, kelambanan, atau pelaksanaan yang tidak maksimal. Strategi ini menjadi cara komunitas mempertahankan ruang kendali tanpa harus berkonflik langsung. Ini menunjukkan adanya negosiasi tersembunyi dalam relasi kuasa ekowisata.

Resistensi juga muncul dari ketakutan terhadap perubahan identitas sosial akibat pariwisata yang membawa gaya hidup dan nilai luar. Anak muda yang lebih tertarik pada pekerjaan pariwisata mulai meninggalkan profesi tradisional seperti nelayan atau pembuat perahu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan tetua adat tentang hilangnya kesinambungan budaya. Resistensi muncul dalam bentuk kampanye informal untuk mengajak anak muda kembali pada akar budaya dan nilai leluhur. Dalam hal ini, resistensi menjadi bentuk konservatisme kultural yang berfungsi sebagai benteng identitas komunitas.

Tidak semua bentuk resistensi mengarah pada penolakan total terhadap ekowisata. Sebagian besar resistensi justru menuntut perubahan pola relasi agar lebih adil dan partisipatif. Warga menuntut transparansi dalam pembagian keuntungan, pelibatan yang lebih awal dalam perencanaan, dan perlindungan terhadap wilayah adat. Dalam hal ini, resistensi menjadi strategi tawar yang dapat mendorong terciptanya ekowisata yang lebih etis dan berkelanjutan. Dengan demikian, resistensi adalah bagian dari dinamika demokratis dalam pengelolaan sumber daya bersama.

Resistensi juga memperlihatkan bahwa masyarakat bukanlah entitas homogen. Di Kayo Pulau terdapat berbagai kepentingan yang saling berinteraksi, mulai dari tokoh adat, pemuda, perempuan, hingga pihak luar seperti pengusaha dan birokrat. Ketegangan dan resistensi seringkali mencerminkan konflik internal di dalam komunitas itu sendiri. Oleh karena itu, ekowisata tidak bisa dipahami hanya sebagai proyek teknis, tetapi sebagai arena politik yang penuh tarik ulur. Resistensi membuka ruang untuk memperbaiki desain partisipasi dan tata kelola yang lebih inklusif.

Dengan demikian, resistensi di Kayo Pulau adalah refleksi dari perjuangan masyarakat lokal untuk menjaga keberlanjutan hidup mereka dalam makna yang menyeluruh. Mereka tidak hanya berbicara tentang kelestarian lingkungan, tetapi juga tentang martabat, hak adat, dan keberlanjutan budaya. Dalam kerangka ini, resistensi bukanlah hambatan, tetapi sinyal bahwa pembangunan pariwisata harus berjalan

seiring dengan prinsip keadilan sosial. Resistensi memperlihatkan bahwa masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga pemilik wacana tentang apa yang dimaksud dengan pembangunan yang bermakna. Oleh karena itu, pengakuan terhadap resistensi adalah langkah penting menuju pariwisata yang benar-benar berakar secara lokal.

Peran Ekowisata Membentuk Persepsi Masyarakat Lokal dan Wisatawan terhadap Identitas Kultural Kayo Pulau

Peran ekowisata dalam membentuk persepsi masyarakat lokal dan wisatawan terhadap identitas kultural Kayo Pulau mencerminkan proses dialektika yang kompleks antara pelestarian dan perubahan. Ekowisata, yang awalnya diperkenalkan sebagai upaya konservasi dan pemberdayaan masyarakat, kini berkembang menjadi sarana representasi budaya yang aktif. Bagi masyarakat lokal, keterlibatan dalam aktivitas ekowisata memungkinkan mereka menampilkan unsur-unsur budaya seperti tari-tarian, makanan khas, dan kerajinan tangan kepada wisatawan. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi persepsi mereka terhadap identitas kultural mereka sendiri, karena identitas tersebut mulai dikonstruksi ulang untuk menyesuaikan dengan ekspektasi wisatawan. Menurut Hall (1990), identitas budaya bukan entitas tetap, melainkan proses “becoming” yang selalu berubah sesuai konteks sosial dan ekonomi.

Perubahan identitas kultural masyarakat Kayo Pulau tidak hanya terjadi secara pasif, tetapi juga melalui negosiasi simbolik yang berlangsung dalam interaksi sehari-hari dengan wisatawan. Masyarakat secara aktif memilih elemen budaya mana yang akan ditampilkan dan mana yang tetap dijaga sebagai bagian dari tradisi sakral. Strategi ini mencerminkan bentuk resistensi kultural yang halus atau “hidden transcript” sebagaimana dikemukakan oleh James C. Scott (1990), di mana masyarakat menjaga nilai-nilai inti mereka sambil tetap berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang menguntungkan. Misalnya, mereka mungkin menampilkan ritual adat dalam bentuk pertunjukan bagi wisatawan, tetapi tetap melestarikan versi aslinya dalam ruang privat dan sakral komunitas. Dengan demikian, ekowisata membentuk arena negosiasi identitas yang dinamis dan kontekstual.

Di sisi lain, wisatawan memainkan peran penting dalam membentuk citra budaya Kayo Pulau melalui lensa eksotis dan narasi wisata. Dalam konteks ini, identitas kultural menjadi komoditas yang dikurasi untuk konsumsi wisata. Sebagaimana dijelaskan oleh Cohen (1988), budaya yang dikomodifikasi berisiko mengalami dekontekstualisasi dan kehilangan makna asli. Persepsi wisatawan terhadap Kayo Pulau sering kali dibentuk oleh narasi promosi wisata dan pengalaman visual yang ditampilkan di media sosial. Hal ini menciptakan gambaran identitas yang bersifat “genuine-imagined”—yakni autentik namun tetap direayasa. Konsekuensinya, masyarakat lokal menghadapi tekanan untuk terus mereproduksi identitas yang dapat diterima dan dinikmati oleh wisatawan.

Perubahan cara masyarakat memaknai simbol budaya mereka juga mencerminkan pergeseran dalam identitas kolektif akibat interaksi wisatawan. Simbol seperti tarian laut, rumah panggung, dan mitos-mitos laut yang dulunya berfungsi sebagai narasi internal kini menjadi bagian dari konsumsi luar.

Sebagaimana diungkapkan oleh Appadurai (1996), globalisasi menciptakan “landscape budaya” yang memungkinkan ide-ide dan simbol berpindah dan berubah makna. Dalam hal ini, ekowisata menjadi kanal yang memediasi proses reimajinasi budaya tersebut. Proses ini dapat memperkuat rasa bangga masyarakat terhadap budaya mereka, tetapi juga membawa risiko alienasi jika simbol-simbol tersebut kehilangan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara bagi generasi muda Kayo Pulau, ekowisata menjadi jendela baru untuk memahami identitas mereka dalam konteks modernitas dan globalisasi. Terlibat sebagai pemandu wisata, pengrajin, atau pengelola homestay memberikan pengalaman baru dalam mengelola identitas kultural secara profesional. Namun, proses ini juga membawa potensi distorsi ketika elemen-elemen budaya dipilih lebih berdasarkan nilai jual ketimbang nilai sakral. Dalam konteks ini, pemaknaan terhadap identitas menjadi semacam “strategic essentialism”, sebagaimana dikemukakan oleh Spivak (1996), di mana identitas tertentu digunakan secara strategis untuk kepentingan ekonomi dan politik. Keseimbangan antara ekspresi budaya yang otentik dan tuntutan pasar menjadi tantangan utama.

Ekowisata juga menciptakan ruang interaksi multikultural yang mempertemukan berbagai nilai, etika, dan harapan antara masyarakat lokal dan wisatawan. Interaksi ini tidak selalu harmonis; terkadang muncul ketegangan nilai yang memicu resistensi, terutama ketika wisatawan tidak memahami norma lokal atau melanggar tabu budaya. Sebagian masyarakat merespons dengan membentuk aturan adat baru atau memperkuat institusi lokal sebagai bentuk regulasi terhadap kehadiran wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa ekowisata bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang politik kultural tempat masyarakat berupaya menjaga kedaulatan budaya mereka melalui mekanisme informal.

Lebih jauh lagi, representasi Kayo Pulau di media sosial dan platform promosi wisata turut memengaruhi persepsi eksternal terhadap identitas budaya mereka. Visualisasi melalui foto, video, dan narasi digital oleh wisatawan menciptakan citra yang tersebar luas namun kerap simplistik. Representasi ini, seperti dijelaskan oleh MacCannell (1976), menciptakan “staged authenticity” di mana budaya ditampilkan dalam versi yang dikurasi demi kepuasan pengunjung. Bagi masyarakat lokal, realitas ini dapat menciptakan ketegangan antara identitas yang mereka alami sehari-hari dengan identitas yang diproyeksikan kepada dunia luar. Muncul kebutuhan untuk mendefinisikan kembali siapa mereka di tengah narasi global yang membingkai mereka.

Dengan demikian, peran ekowisata dalam membentuk persepsi terhadap identitas kultural Kayo Pulau tidak dapat dilepaskan dari dinamika kuasa, pasar, dan budaya. Masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek dalam proses ini, tetapi juga agen aktif yang memilih, menyaring, dan menginterpretasikan kembali identitas mereka. Proses ini menunjukkan bahwa identitas kultural tidak pernah final, melainkan terus dibentuk melalui interaksi sosial, tekanan pasar, dan pilihan strategis masyarakat sendiri. Dalam konteks ini, ekowisata berperan ganda: sebagai pemicu perubahan sekaligus ruang negosiasi dan afirmasi

identitas. Maka dari itu, perlu ada upaya sadar dari semua pihak untuk memastikan bahwa ekowisata mendukung pelestarian nilai-nilai lokal secara bermartabat dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dinamika antara kolaborasi dan resistensi yang terjadi dalam pengembangan ekowisata Kayo Pulau di Kampung Tahima Soroma, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap identitas kultural masyarakat setempat. Ekowisata di Kayo Pulau memberikan dampak positif yang signifikan terhadap identitas kultural masyarakat setempat. Salah satu dampaknya adalah revitalisasi budaya lokal, di mana masyarakat semakin menghargai dan melestarikan tradisi serta adat istiadat mereka yang sebelumnya mulai terpinggirkan. Selain itu, ekowisata membuka peluang ekonomi berbasis budaya, di mana masyarakat dapat memanfaatkan warisan budaya mereka sebagai daya tarik wisata yang membawa manfaat ekonomi, seperti melalui produk kerajinan tangan atau kegiatan wisata berbasis tradisi. Pertukaran budaya yang sehat juga terjadi, di mana wisatawan dapat belajar tentang kebudayaan lokal, sementara masyarakat Kayo Pulau memperoleh wawasan dari pengalaman interaksi dengan wisatawan yang beragam. Tak kalah pentingnya, ekowisata juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan kearifan lokal, di mana kesadaran akan pentingnya menjaga alam dan sumber daya alam tumbuh seiring dengan berkembangnya pariwisata yang ramah lingkungan. Dengan demikian, ekowisata bukan hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan masyarakat dengan identitas kultural mereka.

Meskipun ekowisata di Kayo Pulau membawa dampak positif, terdapat pula dampak negatif yang mempengaruhi identitas kultural masyarakat setempat. Salah satunya adalah komersialisasi dan dekontekstualisasi budaya, di mana tradisi dan praktik budaya lokal sering kali dipertontonkan hanya untuk tujuan komersial, mengurangi makna dan nilai asli dari kebudayaan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan erosi nilai dan identitas kultural, di mana generasi muda mungkin mulai menganggap budaya mereka sebagai sesuatu yang usang dan tidak relevan, sementara kebudayaan luar yang lebih populer menjadi lebih dominan. Perubahan gaya hidup dan sosial juga terjadi, dengan masyarakat yang awalnya hidup dalam pola tradisional mulai beradaptasi dengan gaya hidup modern yang dipengaruhi oleh arus wisatawan dan perkembangan ekonomi. Selain itu, ketegangan dan konflik intra dan inter masyarakat pun muncul, baik dalam hal pembagian hasil ekonomi dari ekowisata maupun perbedaan pandangan terkait cara melestarikan budaya di tengah arus globalisasi. Dampak-dampak negatif ini menuntut perhatian untuk memastikan bahwa ekowisata tidak merusak warisan budaya yang ada, tetapi justru mendukung keberlanjutannya.

Dalam perkembangan ekowisata di Kayo Pulau, masyarakat menunjukkan adanya kolaborasi yang signifikan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi ini menghasilkan upaya bersama dalam merancang dan mengimplementasikan program-program ekowisata

yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendukung pelestarian budaya dan lingkungan. Pemerintah setempat berperan penting dalam memberikan kebijakan yang mendukung pengembangan ekowisata, sementara LSM berkontribusi dalam hal pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola wisata secara berkelanjutan. Lembaga pendidikan turut serta dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam dan nilai budaya. Namun, di sisi lain, terdapat resistensi terhadap perkembangan ekowisata ini, yang terbagi menjadi dua bentuk: resistensi terbuka dan tertutup. Resistensi terbuka biasanya muncul dalam bentuk protes atau penolakan terhadap perubahan yang dibawa oleh ekowisata, terutama terkait dengan dampaknya terhadap budaya lokal dan gaya hidup tradisional. Sementara itu, resistensi tertutup lebih bersifat pasif, di mana masyarakat tidak secara langsung menentang, namun lebih memilih untuk tidak terlibat atau berpartisipasi dalam aktivitas ekowisata, dengan harapan dapat mempertahankan keaslian identitas kultural mereka. Kedua bentuk resistensi ini mencerminkan ketegangan antara mempertahankan tradisi dan menerima perubahan yang datang dengan ekowisata.

Ekowisata memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat lokal terhadap budaya mereka sendiri, sekaligus memengaruhi pandangan wisatawan terhadap identitas kultural Kayo Pulau. Bagi masyarakat lokal, ekowisata dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan dan mempromosikan budaya mereka kepada dunia luar, yang pada gilirannya memperkuat rasa kebanggaan terhadap warisan budaya yang dimiliki. Proses ini mendorong masyarakat untuk lebih menghargai dan melestarikan tradisi serta adat istiadat mereka, karena mereka melihat nilai dan potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari budaya mereka. Namun, dalam beberapa kasus, ekowisata juga dapat memunculkan ketegangan, di mana masyarakat merasa tertekan untuk mengubah atau menyesuaikan budaya mereka agar sesuai dengan harapan wisatawan, yang dapat mengarah pada komersialisasi budaya.

Di sisi lain, pandangan wisatawan terhadap identitas kultural Kayo Pulau juga dipengaruhi oleh pengalaman mereka dengan ekowisata. Wisatawan yang datang dengan niat untuk memahami dan menghargai budaya lokal sering kali membawa serta perspektif baru tentang nilai dan keunikan budaya tersebut. Melalui interaksi langsung dengan masyarakat, mereka dapat memperoleh wawasan lebih dalam mengenai kehidupan dan tradisi masyarakat setempat, yang mungkin berbeda dari pemahaman mereka sebelumnya. Namun, terkadang pandangan wisatawan dapat dipengaruhi oleh ekspektasi yang dibentuk oleh industri pariwisata, yang sering kali menyederhanakan atau mengubah budaya lokal untuk memenuhi preferensi pasar. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara identitas kultural yang ingin dipertahankan oleh masyarakat dan persepsi yang terbentuk di kalangan wisatawan. Sebagai hasilnya, ekowisata tidak hanya berfungsi sebagai jembatan antara budaya lokal dan global, tetapi juga berperan dalam merumuskan ulang cara masyarakat dan wisatawan memandang identitas kultural di Kayo Pulau.

REFERENCES

- Abdullah, I. (2010). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.
- Aronggear, R. P., Poli, A. I., & Mansoben, J. R. (2020). Peran Klan dalam Pemilihan Kepala Kampung Tahima Soroma, Jayapura. *CENDERAWASIH: Jurnal Antropologi Papua*, 1(1), 21-33.
- Brookfield, H. (1993). *Environmental change and the sustainability of Pacific fisheries*. National Centre for Development Studies, Australian National University.
- Chambers, E. (2000). *Native Tours: The Anthropology of Travel and Tourism*. Waveland Press.
- Cohen, E. (1988). Authenticity and commoditization in tourism. *Annals of Tourism Research*, 15(3), 371–386.
- Cole, S. (2007). Beyond authenticity and commodification. *Annals of Tourism Research*, 34(4), 943–960.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Djasman, C.C. dan Kristianingsih, S.A. (2022). Dinamika Psikologis Ketidapatuhan Marga di Kayu Pulau yang Masih Menjalankan Pantangan Mata Rumah. *Humanlight Journal of Psychology*, 3(2): 71-87.
- Firth, R. (1946). *Human Types: An Introduction to Social Anthropology*. London: Nelson.
- Firth, R. (1946). *Malay Fishermen: Their Peasant Economy*. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd.
- Flassy, M., Frank, S. A. K., Idris, U., & Marani, S. M. (2024). Sistem Pengetahuan Kaum Perempuan Suku Enggros Mengenai Hutan Mangrove di Kota Jayapura. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 13(2), 316-327.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Goeldner, C. R. dan Ritchie, J. R. B. (2009). *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*. The 12th Edition.
- Greenwood, D. J. (1989). Culture by the pound: An anthropological perspective on tourism as cultural commodification. In V. L. Smith (Ed.), *Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism* (2nd ed., pp. 171–185). University of Pennsylvania Press.
- Hall, S. (1990). Cultural identity and diaspora. In *Identity: Community, Culture, Difference* (pp. 222–237). Lawrence & Wishart.
- Honey, M. (2008). *Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?* (2nd ed.). Island Press.
- Idris, U., Siregar, L., & Kadir, A. (2024). Melabouw Mihauw: The Tradition of Flying Fish Catching Among the Kayo Pulo People in Papua Indonesia. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 10(2), 111-121.
- Kadir, A., Poli, A. I., Hijang, P., Idris, U., Ali, A., & Sokoy, F. (2021). Local wisdom regarding coastal resource management among a fishermen community in Youtefa Bay, Papua. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 6 (1), 36-46.
- Kadir, A., Rahmanto, M. I., Idris, U., & Ali, A. (2020, October). The process of economic change of the 10522 | Journal of Innovative and Creativity, 5(2) 2025

- Papuans in Jayapura. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 575, No. 1, p. 012040). IOP Publishing.
- MacCannell, D. (1976). *The Tourist: A New Theory of the Leisure Class*. University of California Press.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi ed.). Remaja Rosdakarya.
- Nustad, K. G. (2011). *Governing nature: The politics of ecology in South Africa*. University of Toronto Press.
- Picard, M. (1996). *Bali: Cultural Tourism and Touristic Culture*. Archipelago Press.
- Polii, A. I., Akhmad, A., & Idris, U. (2018). Penerapan Pendidikan Multikultural Sebagai Upaya Mewujudkan Harmoniasi Sosial-Budaya Di Jayapura, Papua. In *Seminar Nasional dan Pra Lokakarya ADJASI*.
- Salazar, N. B. (2012). Community-based cultural tourism: Issues, threats and opportunities. *Journal of Sustainable Tourism*, 20(1), 9–22.
- Satria, A. (2009). *Ekologi politik nelayan: Kemiskinan dan perebutan sumber daya perikanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245–249.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press.
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. Yale University Press.
- Silver, I. (1993). Marketing authenticity in third world countries. *Annals of Tourism Research*, 20(2), 302–318.
- Smith, M. K. (2009). *Issues in Cultural Tourism Studies* (2nd ed.). Routledge.
- Spivak, G. C. (1996). *The Spivak Reader: Selected Works of Gayatri Chakravorty Spivak*. Routledge.
- UNEP & WTO. (2005). *Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers*. United Nations Environment Programme & World Tourism Organization.
- Urry, J. (2002). *The Tourist Gaze*. Sage Publications.
- Wearing, B., & Wearing, S. (2001). Conceptualizing the selves of tourism. *Leisure Studies*, 20(2), 143–159.
- Wearing, S., & Neil, J. (2009). *Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities?* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Yuliana, Y., Frank, S. A. K., & Poli, A. I. (2023). Kearifan Tradisional Orang Kayu Pulo dalam Menjaga Ekosistem Pesisir Kearifan Tradisional Orang Kayu Pulo. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2583-2593.
- Yuliana, Y., Poli, A. I., Idris, U., & Muttaqin, M. Z. (2025). The Role of Indigenous Communities in Turtle Breeding Activities, Skouw Yambe Village, Papua. *ETNOSLA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 10(1), 1-19.
- Zeppel, H., & Hall, C. M. (1991). Selling art and history: Cultural heritage and tourism. *Journal of Tourism Studies*, 2(1), 29–45.